

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelembagaan pertanian di Indonesia baik formal maupun nonformal seharusnya memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan produksi dan pendapatan, serta kesejahteraan petani. Namun kinerjanya belum maksimal yang dicirikan oleh masih sulitnya akses petani terhadap pelayanan lembaga-lembaga pertanian, yaitu lembaga penyuluhan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan dan lembaga pendidikan yang ada termasuk akses pemasaran. Akibatnya produktivitas pertanian dan pendapatan petani relatif rendah.

Keadaan ini disebabkan oleh peran antara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Balai Penelitian, dan Penyuluhan belum terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan pertanian yang mampu memberikan kekuatan bagi petani dalam posisi tawar yang tinggi. Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan di atas. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, (Suhud, 2005).

Untuk mengembangkan dan mengefektifkan serta mensejahterakan petani, maka dibentuklah kelompok-kelompok tani yang diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah yang dapat memotivasi petani sebagai anggotanya untuk lebih aktif dan berperan dalam berbagai kegiatan guna mengembangkan usaha taninya. Pengembangan usahatani melalui kelompok tani adalah sebagai upaya percepatan yaitu petani yang banyak jumlahnya dan kawasan pedesaan yang tersebar dan luas, sehingga dalam pengembangan, pembinaan kelompok diharapkan tumbuh cakrawala dan wawasan kebersamaan memecahkan dan merubah citra usaha tani sekarang menjadi usaha tani masa depan, (Suradisastra, 2008).

Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok dalam keseluruhan rancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005-2025. Selama ini pendekatan kelembagaan juga telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Namun, kelembagaan kelompok tani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mendapatkan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, agar lebih berperan sebagai kelompok tani yang partisipatif, maka pengembangan kelembagaan harus dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani itu sendiri sehingga menjadi mandiri dalam mendukung pembangunan kawasan agribisnis. Pembentukan dan pengembangan kelompok tani di setiap desa juga harus menggunakan prinsip kemandirian lokal yang dicapai melalui prinsip pemberdayaan. Pendekatan yang *top-down* planning menyebabkan partisipasi kelompok tani tidak tumbuh (Suradisastra, 2006).

Dalam proses pengembangan partisipasi pembangunan kelembagaan pertanian banyak menggunakan kelompok sebagai media untuk mencapai tujuan pembangunan. Di daerah pedesaan, berkembang kelompok-kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok ibu-ibu, kelompok usaha, dan sebagainya. Kelompok tani dewasa ini sudah berkembang secara kuantitas, di Indonesia, pada bulan Desember 2010 tercatat sebanyak 279.523 kelompok tani dan 30.636 Gabungan kelompok tani tanaman pangan (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2011). Demikian pula jumlah kelembagaan kelompok tani yang ada Di Provinsi Gorontalo, data kelembagaan kelompok tani pelaku utama dan pelaku usaha pertanian Di Provinsi Gorontalo tahun 2011 sebanyak 104.076 orang dan kelembagaan kelompok tani sebanyak 4600 kelompok sedangkan untuk Kabupaten Pohuwato sebanyak 20.482 orang dan kelembagaan kelompok tani berjumlah 902 kelompok dan untuk Kecamatan Popayato Barat memiliki kelompok tani sebanyak 43 kelompok, (BAKORLUH Provinsi Gorontalo, 2011).

Kabupaten Pohuwato merupakan daerah di Provinsi Gorontalo yang memiliki potensi berupa lahan kering, sawah, peternakan dan perikanan. Khusus

di Kecamatan Popayato Barat, kawasan ini sangat cocok ditanami tanaman pangan padi, jagung dan kedelai karena memiliki keunggulan komparatif, dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan menjadi suatu kawasan pusat pengembangan komoditas jagung. Kabupaten Pohuwato memiliki tiga belas Kecamatan diantaranya Kecamatan Popayato Barat. Kecamatan Popayato Barat terdapat tujuh Desa yang kesemuanya punya potensi berupa sawah dan lahan kering.

Kelembagaan kelompok tani yang ada di Desa Butungale adalah suatu wadah dimana wadah tersebut sebagai merupakan sarana belajar, mengajar, melakukan interaksi satu dengan lainnya serta wadah diskusi dalam hal ini mencari solusi dari masalah masalah untuk tujuan yang diinginkan yaitu peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat tani Desa Butungale, namun kinerjanya belum maksimal yang dilihat dari keadaan lokasi penelitian seperti: tingkat partisipasi pengurus dalam mengelola kelompok tani, sumber daya manusia, jumlah anggota yang kurang berpartisipasi, struktur dan aset kelompok yang tidak menentu, status dan anggota kelompok dalam kepemilikan lahan, kredibilitas pengurus dan kelembagaan penunjang yang ada di Desa tersebut belum maksimal serta interpersi pemerintah dalam pengelolaan proyek kelompok tani. Dari uraian di atas, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana kelembagaan kelompok tani dan bagaimana pula tingkat partisipasi petani pada kelompok di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kelembagaan kelompok tani di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi petani pada kelompok tani di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukanya penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi kelembagaan kelompok tani di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi petani pada kelompok tani di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut masalah yang erat hubunganya dengan masalah penelitian.
2. Bagi petani, yaitu sebagai masukan dan informasi sehingga dapat membantu dalam menghadapi masalah sehubungan dengan pengembangan kelompok tani dalam mendukung pembangunan kawasan pertanian.
3. Bagi pemerintah, yaitu sebagai masukan, gambaran dan pertimbangan mengenai pengembangan kelompok tani dan masalah yang dihadapi kelompok tani, sehingga membantu dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian yang lebih berpihak pada petani.